

8

Adm' #
FE-UMS

**Kajian Penelitian Aktual
Guna Pengembangan Teori Baru
Bidang Ekonomi & Bisnis**

Proseding

**Seminar Nasional &
Call for Paper 2011**



**FAKULTAS EKONOMI
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Prosiding CALL FOR PAPER 19th BIDANG MANAJEMEN & STUDI PEMERINTAHAN

PROSEDING
SEMINAR NASIONAL

PROSEDING

*Kajian Penelitian Aktual Bidang Ekonomi dan Bisnis
dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Organisasi,
Perusahaan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Perekonomian Nasional*

Tema : KAJIAN PENELITIAN AKTUAL BIDANG EKONOMI DAN BISNIS
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI,
PERUSAHAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREKONOMIAN NASIONAL

Hak Cipta ©2011 pada Fakultas Ekonomi,

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978 - 602 - 98739 - 0 - 0

19 FEBRUARI 2011
AULA KAMPUS 1
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI UMSIDA
Jln. Raya Gelam No. 250 Candi Sidoarjo
Telp. (031) 8921938
Email : fe.umsida@yahoo.com

FAKULTAS EKONOMI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2011

PENANGGUNG JAWAB

Heri Widodo, SE., M.Si

KETUA PELAKSANA

Sigit Hermawan, SE., M.Si

TIM SEMINAR NASIONAL

Hadih Fitriyah, SE, M.Si

Dewi Komalasari, SE., MM

TIM CALL FOR PAPER

Amelia Pratiwi, SE., M.E

Dian Palupi, SE., M.S.M

Musdholifah, SE., M.Si

TIM SELEKSI CALL FOR PAPER

Prof. Dr. Djohan Mashudi, MS

Dr. Mashudi, MM

Yie Ke Feliana, SE., M.Com., Ak., CPA., CFP

Sidoarjo, 19 Februari 2011

Dekan FE-UMS/DA

Heri Widodo, SE, M.Si

DAFTAR ISI

A. BIDANG MANAJEMEN

1. Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Kepala Desa Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo
Siti Komariyah 1 - 12
2. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Dan Sikap Pekerja Kearah Perubahan Organisasi Pada Pt Bumi Menara Internusa Surabaya
Liosten Rianna Roosida 13 - 34
3. Pengaruh Stres Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Spg (*Sales Promotion Girl*) Pada Pt. Asta Anugerah
Hesty Prima Rini 35 - 43
4. Peranan Kepemimpinan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Sulsel
Agung Widhi Kurniawan 45 - 66
5. Membangun Keunggulan Bersaing Sistem Operasi Microsoft Windows
Prasetyo Hadi, Sumarto 67 - 85
- 6.. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Budaya Organisasi
Anik Herminingsih 87 - 96
7. Pengaruh Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dosen Di Kota Batam
Sri Langgeng Ratnasari 97 - 104
8. Pengaruh *Internet Financial Reporting* Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Kompas 100)
Dina Yulia, Arum Prastiwi 105 - 117
9. Strategi Meningkatkan *Dividend Payout Ratio*
Ira Wikartika 119 - 129
10. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Supervisor Hotel Bintang Empat Di Surabaya
Fachrudy Asj'ari 131 - 143

11. Faktor Kunci Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil Di Jawa Timur
Sri Muljaningsih, Gendut Sukarno 145 - 158
12. Peranan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pilihan Karir Berwirausaha Pada Mahasiswa
Mery Citra Sondari 159 - 169
13. Hubungan Antara Persaingan Perbankan Dengan Kinerja Keuangan Bank
Musdholifah, Neneng D. Rahmah 171 - 184
14. Analyzing The Differentiation Of The Board Structure Influence Through The Reducing Of Asymmetry Information Around Earning Announcement On The Companies Listed In Bursa Efek Indonesia (Bei) Before And During The Global Crisis Of Financial
Evi Gantiyowati, Irla Nurlinda 185 - 194
15. Influence Of Profitability, Tangibility And Liquidity To Capital Structure At Manufactur Company
Nurina Purmalasari, Falikhatun Izudin 195 - 203
16. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Sistem *Reward* Berbasis Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran
Suliyanto 205 - 214
17. Pengaruh Motivasi, Upah Dan Lingkungan Fisik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi Industri Sepatu Pasca Bencana Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo
Hana Catur Wahyuni, Wiwik Sulistiyowati 215 - 220
18. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (*Studi Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kec. Kalianget Kab. Sumenep*)
Sri Trisnaningsih, Astri Furqani 221 - 235
19. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Mahasiswa Dalam Memilih Jenjang Pendidikan Politeknik
Dyah Widowati 237 - 251
20. Pengaruh Usia, Pengalaman Dan Pendidikan Terhadap Jiwa Kewirausahaan Pengelola Warung Makan Di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Sukardi 253 - 262
21. Kualitas Layanan Pada Jasa Layanan Fotocopi Al-amin Dan Grace Dengan Menggunakan Metode *Servqual*
Wiwik Sulistiyowati, Atikha Sidhi Cahyana 263 - 270
22. Membangun Budaya Religius Untuk Meningkatkan Produktifitas Karyawan Daya Mitra Kausar Group
Jamaaluddin 271 - 282

23. Penentuan Upah Kerja (Insentive Plan) Produk Sandal Santica Dengan Metode Unit Hasil Kerja (Piece Work) Pada Bagian Produksi Pt. Rajawali Eka Paksi Sidoarjo
Boy Isma Putra 283 - 296
24. Daya Saing Produk Makanan Lokal (*Tradisional*) Dibanding Makanan Cepat Saji (*Fast Food*) Berdasar Perilaku Konsumen Remaja Terhadap
Sudiyarto, Ignatia Martha 297 - 305
25. Pengendalian Mutu Produk Pupuk Organik (Studi Kasus Pt. X)
Sri Tjondro Winarno, Sudiyarto, Desak N Siksiawati 307 - 312
26. Manajemen Ramah Lingkungan: Pendekatan Area Tempat Tinggal (*Green Management - A Resident Area Approach*)
Tri Budhi Sastrio 313 - 318

B. BIDANG STUDI PEMBANGUNAN

1. Dinamika Ekspor Dan Analisis Spasial: Menuju *Free Trade Zone* Singapura-Johor-riau (Sijori) Guna Meningkatkan Besaran Makro Ekonomi Di Kabupaten Karimun
Haryono, Abdul Fattah, Heri Widodo 319 - 329
2. Ketimpangan Pembangunan Regional Di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
Wiwin Purnomowati 331 - 345
3. Model *Contract Farming* Dalam Perspektif Ekonomi Politik: Pengalaman Pada Peternakan Ayam
Sumartono 347 - 354
4. *Mapping* Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi Swasta Dan Belanja Modal Pemerintah Di Pulau Madura (Kasus ; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)
Didin Fatihudin 355 - 366
5. Penerapan Strategi *Pro Poor Business* Dalam Pengentasan Kaum Miskin Di Indonesia
Christian Herdinata 367 - 372
6. Faktor-faktor Determinan Sosial Ekonomi Angka Kematian Ibu: Kasus Provinsi Jawa Timur
Achmad Sjafii, Nur Aini Hidayati 373 - 382

**MAPPING PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA, INVESTASI SWASTA DAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH DI PULAU MADURA
(KASUS ; BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, SUMENEP)**

Didin Fatihudin

Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya
[Email: dfatihudin@yahoo.co.id](mailto:dfatihudin@yahoo.co.id)

ABSTRACT

One indicator of a region's economic success is economic growth. Economic growth is meaningless not accompanied by an increase in the welfare of society, whether in education, health, and purchasing power parity. Accumulation of capital is very important in encouraging economic growth 4 districts on the island of Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Private investment and government capital expenditures have a multiplier effect on economic growth, employment and national income. National income can be evaluated from three aspects, namely production (GNP), income (GNI) and expenditure (GNE). National income can be affected by consumption, investment, government spending and net exports. The potential of natural, cultural community, the readiness of the bureaucracy, labor quality, investment climate affect, economic growth and prosperity. Therefore this study aims to conduct mapping from 2002 to 2006 about the potential nature, realization of private investments, the realization of government capital expenditure, percentage of employment in the four districts on the island of Madura as an initial study that needs follow up study in more detail next and linking between these variables.

Keywords: economic growth, employment absorption, private investment, government capital expenditure.

PENDAHULUAN

Jawa Timur sebagai Provinsi kedua terbesar di Indonesia dalam pertumbuhan ekonominya setelah Prov. DKI Jakarta. Prov. Jawa Timur juga memiliki kontribusi PDRB sebesar 13 persen pada PDB Indonesia. Salah satu tolok ukur prestasi ekonomi suatu daerah adalah tingginya angka PDRB dari Barang dan Jasa setiap tahunnya. PDRB tersebut dapat dioptimalkan bila masyarakat di Jawa Timur mampu dieksploitasi dan dieksplorasi faktor-faktor produksi yang dimilikinya dengan baik, seperti kekayaan daerah (*land*), tenaga kerja (*labor*), akumulasi modal (*capital*) dan *managerial skill* (Samuelson, 2003:315), Pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika keempat faktor produksi tersebut dapat dikelola dengan baik dan profesional. Kiranya tidaklah mudah untuk mengelola Prov. Jawa Timur yang wilayah sangat luas dan berjumlah 38 kab/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 9 kota. Akumulasi modal dan inovasi teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari teknologi produksi dapat memperbesar kapasitas produksi melalui efisiensi produksi. Mobilitas barang dan jasa, modal, teknologi, tenaga kerja akan merambah ke berbagai daerah. Teknologi komunikasi, transportasi dan informasi semakin maju pesat. Kemajuan ini didorong oleh Negara-negara maju yang mampu menginvestasikan kembali modalnya ke dalam

produk-produk baru yang inovatif. Sehingga pertumbuhan ekonominya cukup tinggi Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ke depan.

Walaupun ada perbedaan tujuan antara investasi swasta dengan dengan kepentingan pemerintah daerah, investasi swasta sangatlah penting di samping belanja modal pemerintah daerah. investasi swasta dapat menyediakan lapangan pekerjaan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan. Penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi oleh pemerintah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Prov. Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi yang luas dan sumber daya manusia yang berkualitas mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Namun riatur diingat bahwa kesejahteraan masyarakat di Prov. Jawa Timur tidak hanya dapat dicapai hanya oleh pertumbuhan barang dan jasa saja, tetapi harus juga dibarengi dengan pembangunan ekonomi bidang lainnya seperti peningkatan pendidikan, gizi/kesehatan dan keamanan dan lainnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, yakni peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi. Mampu mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi, mampu mendekatkan pada pemerataan pendapatan dan mampu menjaga stabilitas ekonomi, moneter dan keamanan. Pemerintah harus mampu menjamin keamanan usaha bagi para investor dalam menjalankan perusahaannya. Perbankan di daerah harus mampu menjalankan fungsinya sebagai media peredaran. Kredit investasi dapat disalurkan dengan baik pada sektor riil. Tumbuhnya produksi di sektor riil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Prov. Jawa Timur. Kajian ini merupakan studi awal, yang akan dijadikan dasar perbandingan tentang optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh adanya perubahan perkembangan investasi swasta dan belanja modal pemerintah daerah kab/kota yang ada di pulau Madura ; Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Berdasarkan pemikiran di atas dalam kajian ini masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut ; Bagaimana Pernerataan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui investasi swasta dan belanja modal pemerintah kabupaten di Pulau Madura Prov. Jawa Timur kasus Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memetakan bagaimana data sebenarnya mengenai investasi swasta dan belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 4 Kabupaten di Pulau Madura yang meliputi ; Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat pengembangan ilmu pembangunan ekonomi dan investasi. Juga bermanfaat bagi para peneliti lanjut dan para pengambil keputusan di empat kabupaten di Pulau Madura sebagai dasar pengambil kebijakan ekonomi di masa depan.

TINJAUAN TEORI

Menurut Todaro (1999:124-130) menyebutkan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yakni ; pertama, akumulasi modal, ; kedua, pertumbuhan penduduk, dan ; ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan dikemudian hari. Teori pertumbuhan dari Adam Smith yang mengkaji pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis (Budiono, 1999:8) menyatakan ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu : 1) pertumbuhan *output* (GDP) total, dan 2) pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi menurut Kuznets dan H.B. Chenery dalam Mahyudi (2004:1) dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadinya perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan

penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. *Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor* Ohingan, (2007:67-77), yakni : 1) *faktor ekonomi* ; dan 2) *faktor non ekonomi*. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumberdaya alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya (ekonomi). Tetapi diingat bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi jika ditunjang oleh perubahan-perubahan lembaga sosial kondisi politik, nilai-nilai moral dan sikap budaya dalam suatu bangsa (non ekonomi).

Pembangunan ekonomi menurut Kuznets dan H.B. Chenery dalam Mahyudi (2004:1) dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadinya perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan Lapangan kerja. Baldwin dan Meier dalam Abipraja (1993:1) *Economic development is a process where by an economy's real national income over a long period of time*. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian meningkat selama kurun waktu yang panjang, jika tingkat pembangunan itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan bertambah. Schumpeter dalam Abipraja (1993:54) memiliki keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Dalam pembangunan yang memegang peranan penting adalah golongan pengusaha (*entrepreneur*) yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang dapat mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang keperluan masyarakat. Pengusaha menciptakan pembaharuan inovasi dalam perekonomian.

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Besar kecilnya investasi yang direalisasikan dalam suatu negara dapat berpengaruh pada besar kecilnya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Dornbusch (1986:236) investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Ada beberapa jenis investasi yakni : 1) *Autonomous investment dan induced investment*, 2) *Public investment dan private investment*, 3) *Domestic investment dan foreign investment*, dan 4) *Gross investment dan Net investment* (Rosyidi, 2004:169-172). Investasi otonom (*Autonomous investment*) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tidak dapat berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor-faktor lain pendapatan yang mempengaruhi tingkat investasi seperti itu misalnya, tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan para pengusaha, dan sebagainya. Menurut Robinson dalam Rosyidi, (2004:165) pengeluaran investasi menurut penggunaannya dibagi menjadi tiga kepentingan, yaitu : 1) konstruksi (*construction*), 2) perbaikan (*rehabilitation*), dan 3) perluasan (*expansion*). Konstruksi adalah pengeluaran untuk membangun sesuatu hal yang memang baru ; rehabilitasi pengeluaran yang diperuntukkan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak (menyusut). Sedangkan ekspansi yaitu pengeluaran untuk memperbesar kapasitas, mempertinggi volume atau memperlebar ruang gerak.

Belanja pemerintah digolongkan menjadi dua, yakni konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno, 2000:38). Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan, beli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi. Di Indonesia pengeluaran konsumsi tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi tercermin dalam pengeluaran pembangunan.

Menurut Sukirno (2000:151-152) bahwa Jumlah pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu itu tergantung beberapa faktor, antara lain: a) jumlah pajak yang diramaikan, (b) tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, (c) pertimbangan politik dan stabilitas negara. Faktor pertama, penentu besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak. Pemerintah harus mampu memprediksi seberapa besar pajak yang akan diterima. Makin besar jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin besar pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Faktor kedua, kegiatan ekonomi akan diatur ke arah yang diinginkan pemerintah, misalnya mengurangi pengangguran, menghindari inflasi dan percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang akan menarik swasta berinvestasi dan memicu pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak terbatas, maka pinjaman asing atau swasta dalam negeri dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, jalan-jalan, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan, sehingga pada gilirannya kegiatan ekonomi tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja. Faktor ketiga, stabilitas politik dan keamanan akan berpengaruh pada besar anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik dan keamanan negara menyebabkan kenaikan belanja pemerintah terutama biaya operasi militer perlu dilakukan. Ancaman negara asing dapat menimbulkan belanja peralatan militer meningkat. Jika dari pengeluaran pemerintah di bagi dua jenis, yaitu ; *Exhaustive expenditure* dan *Transfer Payment* (Suparmoko,2001:24-32). *Exhaustive expenditure*, yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun menghasilkan barang lain lagi, dengan kata lain mengalihkan faktor produksi dari satu sektor swasta ke pemerintah. Sedangkan *Transfer Payment* merupakan pemindahan kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada negara sebagai hadiah (*grants*). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijaksanaan pemerintah, karena pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan atas pembelian barang dan jasa. Pemerintah daerah untuk menambah aset-asetnya, baik aset riil maupun aset finansialnya ia akan melakukan pembelanjaan yang sumber dananya dikeluarkan melalui anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. yang telah disetujui bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD di daerah.

Permendagri No.13/2006 dan No.59/2007 menyebutkan Belanja Modal adalah pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan (satu tahun).

Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan menurut SAP-2005 dalam Halim (2007:113-114) ; Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP-2005). Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama : Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan ; Jalan, Irigasi dan Jaringan ; dan Fisik lainnya.

Halim (2004:72) Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri; Pertama; Belanja publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Kedua, Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode yang akan datang.

Pembentukan modal manusia berkaitan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif (Jhingan,2007:414). Penduduk merupakan tenaga kerja (*man power*) yang dapat meningkatkan volume produksi dan kapasitas

kelompok sektor (1) sektor primer (2) sektor sekunder ; dan (3) sektor tersier. Secara terinci sektor lapangan pekerjaan/usaha yang biasa dihitung dalam PDB negara kita adalah sembilan sektor, yakni (1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri pengolahan (4) Listrik, Gas dan Air Bersih ; (5) Bangunan (Konstruksi) (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran ; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan (9) Jasa-jasa.

Widodo (1990:110) Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat antara jumlah angkatan kerja (AK) dan jumlah kesempatan kerja (KK) yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja maka terjadi pengangguran atau dengan kata lain bju pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan laju pertumbuhan pengangguran juga bertambah dan sebaliknya.. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan untuk memilih suatu kebijakan pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi dengan program padat modal atau padat karya. Adapun formula untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja, berikut ;

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta APDRB}$$

E_{kk} adalah elastisitas kesempatan kerja ;

ΔK adalah laju pertumbuhan kesempatan kerja ;

ΔPDB adalah laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*).

Angka elastisitas kesempatan kerja semakin tinggi dari suatu daerah/negara, ini memberi indikasi bahwa kemampuan daerah/negara tersebut memiliki kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja yang semakin tinggi. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi memberi indikasi perluasan usaha lebih mengarah pada padat modal, bukan padat karya.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini digunakan *metode dokumenter* dengan *teknik sensus*. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan BPM Jawa Timur dan BKPM Jakarta. Ruang lingkup analisisnya data *time series* tahun 2002 hingga tahun 2006 dan data *crosssection* empat kabupaten, yakni meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Kajian ini hanya sebatas pemetaan saja dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaitkan antar variable.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini akan diuraikan secara deskripsi hasil pengumpulan data yang telah diolah dari masing variable; investasi swasta, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja dari keempat kabupaten di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur ; Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Secara kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 1,5,6,7 dan 8 di bawah ini.

1. Investasi Swasta di Pulau Madura

Tabel 1

NILAI REALISASI INVESTASI SWASTA (PMDN-PMA) 4 KABUPATEN DI PULAU MADURA
TAHUN 2002 HINGGA 2006 (Dalam Rupiah dan SUS)

Kabupaten	TABEL									
	Aiw		19Th		zol		N4		PTIN	
	P11w	F1.4 ilull	ist23	PWAlit	L/a'4	Pijil1.19:	1113N	146wtd%	114.1	1'1-..%
049. lor	1N	0.03	0.30	0.10	1K	0.10	LM	0.30	1 fot	t.0t
8.111:44	0	0.14	dhl	0.3.3	4 K.	0.11	il (<	au.	4 tbut	hx,
Pre4mur,	3 DC	[1 N	0.1:0	0.»	1 u	q C4	0:4	0.91	1.03	NI)
Skdy-"II	1N	0.K	01Fi	0>1	3P(31231Y),(4	0.13	3 tC	trf:
Ratori,-	11:2. ff	251112	3; 71,7*	x211713	144(41%	014.33	u3 11.-6f	341.55!	446 61242	SIE22.31
nyu T074,	1.14, NRS1	11:1440	.4113jfb	d:NIjft nt	14:3 reab	w tei rr	431 34.1 u	S44 m r<	117 413 irjoo	1 tL: NOj!

Sumber : BKPM Jakarta dan BPS-JATIM, dio1ali (2007)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi swasta (PMDN-PMA) di Pulau Madura pada periode penelitian 2002-2006 nampak bahwa hanya modal asing (PMA) di Kab.Sumenep pada tahun 2004 sebesar 2.420 SUS atau setara 21.780.000 milyar rupiah bila nilai tukar 1 dollar 9000 rupiah, dan di Kab.Sampang modal domestik (PMDN) tahun 2006 sebesar 4 milyar rupiah saja. Tidak ada nilai investasi swasta baik domestik maupun asing yang direalisasikan dan ditanam di Kab. Bangkalan dan Kab.Pamekasan. Bila dibandingkan dengan rata-rata nilai realisasi investasi swasta di Provinsi Jawa Timur, keempat kabupaten di Pulau Madura ini jelas di bawah rata-rata provinsi.

Bila ingin mengetahui potensi sumberdaya alam dan peluang investasi pertambangan Minyak dan gas, Pertanian, Pariwisata 4 kabuten di pulau Madura menurut lokasi pengembangan dan potensi unggulan sebenarnya dapat dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini.

Tabel 2

PELUANG INVESTASI PERTAMBAHAN MINYAK DAN GAS 4 KABUTEN DI PULAU
MADURA MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN DAN POTENSIUNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI	
	KABIKOTA	POTENSIUNGGULAN
M	Kab.Bangkalan	Phospat, Batu Gamping, Dolomit, Pasir Kwarsa, dan Kaskit.
	Kab.Sampang	Phospat dan Batu Gamping.
	Kab.Pamekasan	Batu Bata Putih, Pasir Kwarsa, Phospat, Gas dan Minyak Bumi.
	Kab.Sumenep	Batu Gamping, Dolomit, Pasir Kwarsa, Phospat, Gas dan Minyak Bumi.

Sumber : BPM Provinsi Jawa Timur 2007 (diolah)

Tabel 3
 PELUANG INVESTASI PERTANIAN 4 KABUPATEN DI PULAU MADURA
 MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN DAN POTENSI UNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI KABIKOTA	POTENSI UNGGULAN
VI	Kab.Bangkalan	Padi, Jagung,Kedelai,Ubi kayu,Kacang tanah,Cabe, Pisang dan Melati.
	Kab.Sampang	Padi,Jagung,Kedelai,Ubi kayu,Pisang,Jambu air, dan Temuireng.
	Kab.Pamekasan	Padi,Jagung,Ubi kayu, Jahe,Lengkuas,Temulawak,cabe, Durian dan Pisang.
	Kab.Sumenep	Padi,Jagung,Ubi kayu,Cabe Jamu,Mangga dan Pisang.

Sumber : RPM Provinsi Iowu Timur 2007 (diolah)

Tabel 4
 PELUANG INVESTASI *PARIWISATA (ALAM, BUDAYA, AGAMA)* 4 KABUPATEN DI PULAU
 MADURA MENURUT LOKASI PENGEMBANGAN DAN POTENSI UNGGULAN

WILAYAH PENGEMBANGAN	LOKASI KABIKOTA	POTENSI UNGGULAN
VI	Kab.Bangkalan	Pantai Siring Kemuning, Makam Ratu Ebhu dan Kerapan sapi.
	.Kab.Sampang	Pantai Camplong, Hutan Nipah, Waduk Kalmpis dan Kerapan sapi.
	Kab. Pamekasan	Pantai talang Siring, Api Tak Kunjung Padam, Pantai Jumiang, pantai batu Kerbul dan Kerapan Sapi
	Klab.Sumenep	Pantai Lobang,Pantai Slopeng,Pulau Mamburit,Taman laut,Keraton dan Musium Makam Astatenggi

Sumber : RPM Provinsi 'alma Timur 2007 (diolah)

Bila mengamati Tabel 2, 3 dan 4 di atas sebenarnya 45 kabupaten di Pulau Madura memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan dapat dijadikan peluang investasi di masa mendatang seperti minyak bumi dan Gas di Kab. Sumenep dan Pamekasan. Kedelai, Jagung dan pisang hampir di semua kabupaten ada. Begitu pula pada sektor pariwisata yang dapat meningkatkan PAD seperti kerapan sapi di seluruh kabupaten, pantai slopeng di Sumenep, Api tak kunjung padam di Kab.Pamekasan. Potensi alam ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah kabupaten di Pulau Madura.

2. *Belanja Modal Pemerintah di Pulau Madura.*

Tabel 5

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH 4 KABUPATEN DI PULAU MADURA -
TAHUN 2002 HINGGA 2006(Dalam Jutaan Rupiah)

KABUPATEN	2002	2003	2004	2005	2006
P. Sampang	44.144	42.600	45.015	35.124	44.110
Kab. Sumenep	7,0	103.521	135.100	104.557	110.364
Kab. Bangkalan	55.548	64.933	67.548	71.113	75.440
Kab. Pamekasan	14.444	14.210	14.819	14.850	16.822
Rerata 4 Kabupaten	1145.511	1941.0386	2254.317	2113.818	2427.711
Tiam	43524	46461	43453,70	186603	33464X,141,50

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur diolah (2007)

Berdasarkan data pada Tabel 5 bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah empat kabupaten di Pulau Madura menunjukkan bahwa keempat kabupaten secara bervariasi masing-masing belanja modal kabupaten setiap tahunnya ada yang naik ada yang turun. Pada tahun 2002 paling tinggi Kab.Sampang, tahun 2003 kab.Sumenep, tahun 2004 Kab.Bangkalan, tahun 2005 Kab.Sampang dan tahun 2006 kab.Pamekasan. Bila diamati dari jumlah nilai belanja modal yang direalisasikan Pernda melalui APBDnya pada umumnya keempat kabupaten tersebut tidak ada yang secara konsisten setiap tahunnya terus meningkat.

3. *Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura*

Tabel 6

PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2000
4 KABUPATEN DI PULAU MADURA TAHUN 2002 HINGGA 2006(Dalam persen)

KABUPATEN	2002		2003		2004		2005		2006	
	Primor	Sok	Primor	Sok	Primor	Sok	Primor	Sok	Primor	Sok
Bangkalan	39,80	10,24	49,95	38,17	10,7	51,15	37	11,01	52	35,33
Sampang	53,26	15,05	31,65	53,14	14,55	32,31	52,92	13,83	33,24	52,2
Pamekasan	57,16	7,78	35,05	57,14	7,68	35,18	56,61	7,6	35,8	56,1
Sumenep	53,25	10,75	31	58,01	11,06	30,9	58,08	11,04	30,9 ¹	57,83
Rerata 4 Kabupaten	29,37	24,66	45,76	28,74	24,37	47,41	28,23	23,48	46,85	27,53
M. On. Jabm	0,20	7,78	24,30	0,19	7,68	25,11	0,19	7,60	25,92	0,18

Sumber : BPS, BAPPEPROP Jawa Timur, Kabupaten/Kota, diolah (2007)

Berdasarkan data di atas bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral PDRB atas harga konstan 2000 di empat kabupaten di pulau Madura menunjukkan Kabupaten Bangkalan pertumbuhan ekonomi secara konsisten mulai tahun 2002 hingga 2006 sektor tersier lebih tinggi dari sektor primer dan sektor sekunder. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya seperti Kab.Sampang, Pamekasan dan Sumenep justru sektor primer-lah yang paling tinggi pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan pertumbuhan ekonomi sektor modern lebih tinggi dibandingkan ketiga kabupaten lainnya.

4. Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Madura

Tabel 7
PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 4 KABUPATEN
DI PULAU MADURATAHUN 2002 HINGGA 2006 (dalam persen)

KABUPATEN	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bangkalan	38,27	26,27	-26,13	13,37	17,91
Sampang	16,44	26,52	-16,33	-0,03	-2,64
Pamekasan	2,53	18,73	-0,45	-13,16	2,57
Sumenep	24,00	16,70	-3,89	-1,28	1,68
RerataJatim	21,45	8,75	-12,64	4,29	2,21
Jawa Timur	20,40	9,13	-12,61	4,98	0,00

Sumber : BPS Tahun 2007 Jawa Timur, Kabupaten/Kota, diolah

Tabel 8
RATA-RATA PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL
D1 PULAU MADURA TAHUN 2002 HINGGA 2006 (dalam persen)

KABUPATEN	Primer	Sekunder	Tersier
Bangkalan	62,66	11,51	28,35
Sampang	77,18	5,60	17,22
Pamekasan	75,90	4,99	19,15
Sumenep	69,24	11,35	19,41
RerataJatim	43,16	20,31	38,59
Jawa Timur	45,92	18,44	36,34

Sumber : BPS Tahun 2007 Jawa Timur, Kabupaten/Kota, diolah

Berdasarkan Tabel 7 mengenai pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Pulau Madura tahun 2002 hingga 2006 dalam persen menunjukkan arah yang menurun terutama dari mulai tahun 2003 hingga tahun 2006 bahkan minus penyerapan. Begitu pula untuk tingkat Provinsi Jawa Timur baik dilihat dari rata-rata maupun jumlahnya *trend-nyajuga* menurun terutama mulai tahun 2003 hingga 2006. Begitu pula bila mengamati Tabel B rata-rata penyerapan tenaga kerja dari per sektor trend-nya juga persentasenya menurun. Penyerapan pada sektor primer menempati urutan yang paling tinggi persentasenya, bila dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Bahkan sektor primer di keempat kabupaten tersebut lebih tinggi persentase penyerapan tenaga kerja bila dibandingkan dengan angka penyerapan tenaga kerja di tingkat provinsi Jawa Timur. Tetapi untuk penyerapan tenaga kerja sektor sekunder dan sektor tersier keempat kabupaten tersebut tetap masih di bawah angka penyerapan tenaga kerja di tingkat provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa investasi swasta baik PMDN maupun PMA di Madura hampir tidak ada, hanya PMDN di kab.Sampang pada tahun 2006 dan PMA di Sumenep 2004. ada beberapa hal yang dapat dikemukakan berkaitan dengan faktor di atas, yakni ; pertama, pada umumnya masyarakat di pulau Madura baik secara struktural maupun kultural belum siap untuk menerima orang lain selain

orang Jawa dan Madura. Kedua, mernang potensi alamnya yang belum menarik para investor untuk membuka usahanya di Pulau Madura, baik dari aspek pasar maupun unsure profitabilitasnya. Ketiga, unsure kelembagaan birokrasi di empat kabupaten belum siap. Keempat, aspek keamanan untuk investasi masih rendah, sehingga para investor baik domestik maupun asing ada kekhawatiran tidak aman dalam menjalankan usahanya. Jangan kan untung, kembali modal saja masih dipikirkan terlebih dahulu. Para investor akan selalu berpikir menguntungkan atau tidak. Kiranya menguntungkan maka dia akan berusaha mendirikan usahanya. Kelima, bisa jadi Infrastrukturnya yang belum memadai dan mendukung kegiatan ekonomi dan produksi seperti jalan, air, telepon, listrik dan sebagainya masih perlu banyak perbaikan di sana sini. Keenam, adalah tak kalah pentingnya disbanding sumber daya alam adalah kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang masih rendah.

Adapun tentang belanja modal pemerintah mengapa belanja modal pemerintah berpluktuatif, dan tidak ada yg konsisten meningkat atau turun dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Ini bisa saja disebabkan ; pertama, oleh awal berlakunya Undang-undang Otonomi daerah pada tahun 2001 tentang pemerintah daerah dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua, realisasi APBD belum terserap di sektor riil, karena ada kekhawatiran dari para birokrat dan investor terlibat KKN dan termasuk kategori korupsi. Ketiga, masih lemahnya para perencana pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi. Keempat, intensifikasi penerimaan sektor pajak, retribusi dan pajak lainnya masih rendah. Ini bisa saja disebabkan oleh lambatnya pembangunan infrastruktur sehingga berakibat lambatnya kegiatan dan mobilitas ekonomi. Bila kegiatan ekonomi melambat, maka dapat diduga penerimaan pajakpun menjadi rendah pula. *Effect Multiplier* dari infrastruktur adalah adanya peningkatan di sektor pajak dan retribusi.

Mengapa pertumbuhan ekonomi sektoral Kab Bangkalan tersier tertinggi, lainnya pada sektor primer. Secara geografis kab. Bangkalan lokasinya paling dekat dengan kota Surabaya. Surabaya merupakan kota kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota besar banyak memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi. Perputaran uang, barang dan jasa berjalan cepat. Sektor industri dan jasa berdiri dan tumbuh dimana-mana, begitu pula di bangkalan, sehingga logislah bila Kab. Bangkalan, sektor tersiernya tinggi. Moda transportasi di Kabupaten Bangkalan lebih baik bila dibandingkan dengan kab. lainnya. Sektor industri, jasa dan perekonomian modern lebih banyak berada di kab. Bangkalan dibanding kab lainnya.

Memang pertumbuhan ekonomi di Kab. Bangkalan dan 3 kabupaten lainnya belum menunjukkan pemerataan pendapatan, bisa saja kegiatan ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Agar ini tidak terjadi maka kebijakan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pembangunan di bidang lainnya, seperti adanya peningkatan dalam bidang pendidikan, gizi dan kesehatan keluarga dan kemampuan daya beli masyarakat. (*purchasing power parity*).

Mengapa trend penyerapan tenaga kerja 4 kab. Di pulau Madura dan Jatim menurun, bahkan negative, bagaimana dengan pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan memang dapat diciptakan oleh ketidak tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bisa saja pengangguran itu tercipta karena structural kebijakan pemerintah atau lainnya. Tersingkir dari pekerjaan memang pekerjaannya dapat digantikan oleh mesin produksi yang lebih modern dan efisien. Atau pada saat itu 2002 hingga tahun 2006 di empat kabupaten di pulau Madura tersebut banyak industri berada pada *capital intensif* (padat modal), sehingga tidak banyak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Karena tidak mampu bersaing dengan modernisasi produksi, maka sebagian masyarakat Madura banyak bekerja pada sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, yang tentu saja mungkin sebagian orang menganggap pekerjaan di bidang tersebut tidak perlu memiliki keterampilan khusus, seperti di pabrik modern.

Mengapa penyerapan tenaga kerja pada sektor primer tertinggi di keempat kab di pulau Madura bila di bandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Urutan kedua adalah sektor

.1.

dan diikuti oleh sektor sekunder. Masih banyak masyarakat Madura bekerja pada sektor dan sektor tradisional Sektor ini tidak banyak menuntut keterampilan khusus. Sesuai kekayaan daerah pulau Madura yakni pertanian, perikanan dan perkebunan. jadi logislah syarakt Madura banyak bekerja pada sektor primer pertanian perkebunan, perikanan ernakan.

JL DAN SARAN

investasi swasta di pulau Madura masih rendah. Besaran realisasi belanja modal pemerintah empat kabupaten sangat *berfluktuatif* baik besarnya maupun *trend-nya*. Pertumbuhan ekonomi empat kab. di pulau Madura lebih banyak pada sektor tradisional yakni primer, kecuali Kab. Bangkalan setiap tahun sektor tersiernya selalu paling tinggi dibanding dengan sektor sekunder maupun sektor primernya. Adapun penyerapan tenaga kerja semua kabupaten di pulau Madura mengalami penurunan setiap tahunnya bahkan menjadi minus, tidak adan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja(1993),*Ekonomi Pembangunan Pengantar dan Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press.
- Budiono,(1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan ke Enam, Yogyakarta, BPFU-UGM,
- Badan Pusat Statistik, (2007), *Jawa Timur Dalam Angka*, Surabaya, BPS.
- Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur, 2007*, Surabaya, BPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (2007) Jakarta*,
- Dornbusch, Rudiger, and Stanley Fisher, (1986), *Macroeconomics*, Terjemahan, Edisi ketiga, Jakarta, Erlangga.
- Halim, Abdul, Theresia Damayanti, (2007), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Yogyakarta, UPP STIM-YKPN.
- Halim, Abdul, (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Yogyakarta, UPP-YKPN.
- Mahyudi, Ahmad, (2004), *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007, Jakarta, Depdagri.
- Rosyidi, H, (2004), *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi baru, Jakarta, Rajawali Pers.
- Todaro, Michael P., (1999), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 1 dan 2 Jakarta, Indonesia.
- Sukirno, Sadono, (2000), *Makroekonomi Modern ; Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*, Jakarta, Rajawali Pers.

Samuelson,Nordhaus,(2003) *Microeconomics*, Terjemahan, Edisi ketujuh belas, Jakarta, PT Media Global Edukasi.

Soeparmoko,(2001), Ekonomi publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi pertama, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Jhingan,M.L.,(2007), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi keenam Belas, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.